

TATA TERTIB

2024

KEPDPRD NOMOR 21 /DPRD.LPG/III.01/2024, 6 HLM

PENETAPAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk memberikan landasan hukum atas penetapan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib yang akan menjadi pedoman kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Penetapan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun dan menetapkan tata tertib yang mengatur tata cara penyelenggaraan kegiatan, hubungan antaranggota, serta hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah daerah.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - Keputusan ini memuat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap rancangan tata

tertib yang telah disusun dan dibahas bersama. Rancangan tata tertib ini mencakup ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , mekanisme kerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , pengelolaan rapat, serta pengaturan kode etik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Selain itu, keputusan ini mengatur penugasan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendukung pelaksanaan tata tertib yang telah disahkan, termasuk penyebarluasan informasi terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2024.